



RENCANA KERJA TAHUN 2025



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Jalan Danau Luar No. 01 Telp. (0567) 21359

Website: satpolpp.kapuashulukab.go.id - Email satpolpp@kapuashulukab.go.id

PUTUSSIBAU 78711

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa karena berkat dan rahmat Nya, Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2025 ini dapat tersusun.

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Renja SKPD ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 serta Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 disusun dan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Putussibau, Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,


BAHTIAR, S.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671010 199703 1 007

1950

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
1.3.1 Maksud.....	3
1.3.2 Tujuan.....	4
1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN.....	4
BAB II.....	5
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....	5
2.1. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....	5
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	10
2.3. ISI-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.....	17
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....	18
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	30
BAB III.....	31
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	31
3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	31
3.2 TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	31
3.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN.....	33
BAB IV.....	
PENUTUP.....	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD 6

Tabel 2. 2 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD..... 10

Tabel 2. 11 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 20

Tabel 2. 12 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025..... 30

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP Tahun 2025 32

Tabel 3. 2 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Target Capaian Kinerja Renja Tahun 2025 34



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan Penegakan Peraturan Daerah serta perlindungan masyarakat. Selanjutnya dalam rangka mendorong terciptanya situasi yang kondusif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, perlu ditunjang dengan peningkatan sistem pertahanan, keamanan dan ketertiban dengan kebijakan yang diarahkan kepada peningkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, guna mendukung pelaksanaan hal tersebut diatas serta mendukung kelancaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu maka sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mana nantinya akan digunakan sebagai pedoman / arahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menunjang pelaksanaan pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Kapuas Hulu.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan, pengendalian, dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 54 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
21. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
22. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025;
23. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 02 Tahun 2023 tentang Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan Program/ Kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran serta, terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 adalah:

- a. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025;
- b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan; dan
- d. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- e. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKA dan Dokumen Anggaran;
- f. Sebagai patokan serta evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

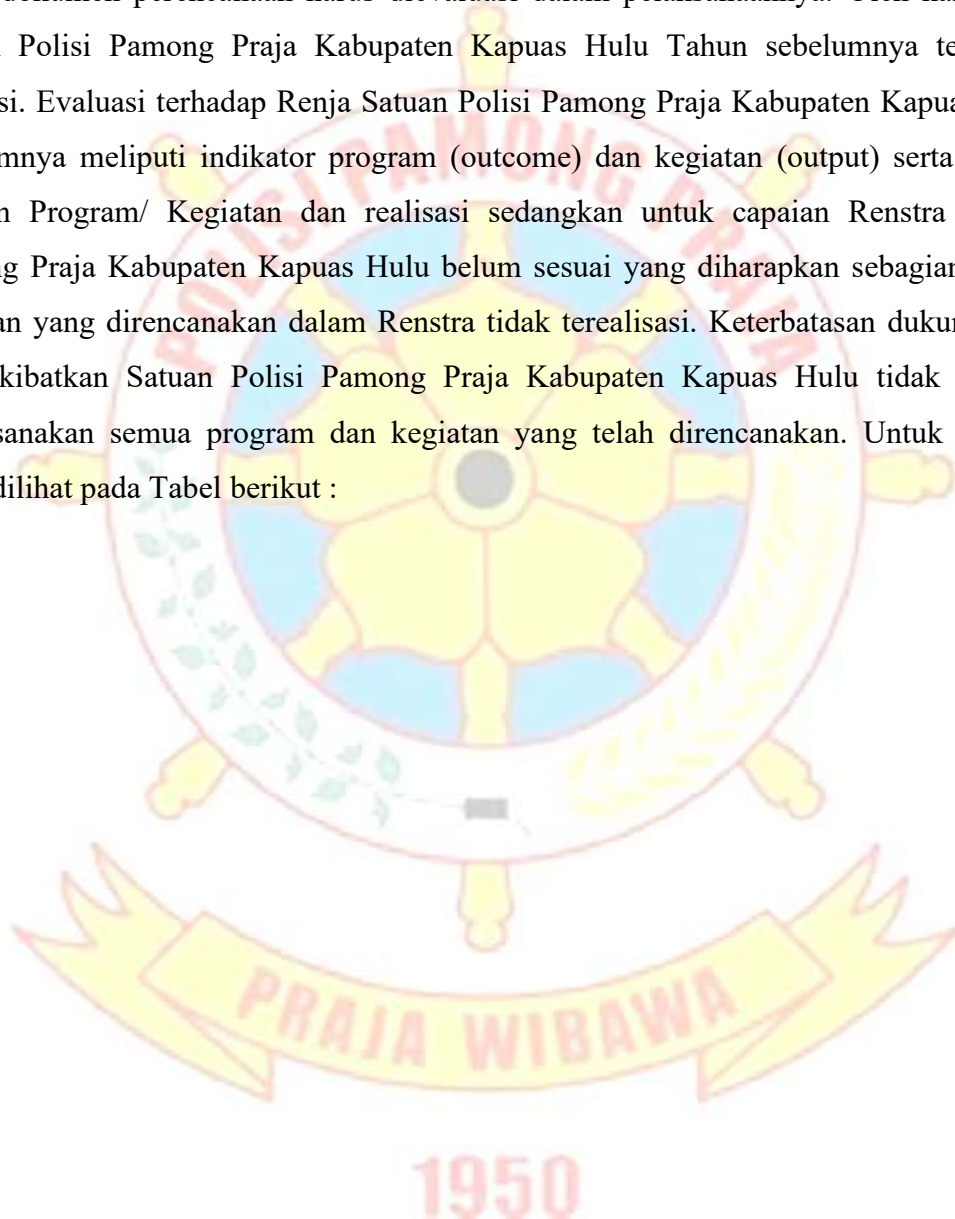
BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun sebelumnya telah dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun sebelumnya meliputi indikator program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian Program/ Kegiatan dan realisasi sedangkan untuk capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu belum sesuai yang diharapkan sebagian program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renstra tidak terealisasi. Keterbatasan dukungan anggaran mengakibatkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tidak leluasa dalam melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah direncanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :



Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Akhir Renstra		Realisasi Tahun 2023		Target 2024		Realisasi Kinerja Triwulan								Capaian Kinerja		Realisasi Kinerja Renstra		Tingkat Capaian (%) Terhadap Renstra		Penang ung Jawab
										I		II		III		IV								
				1		2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU					15.813.168.731		10.328.347.998		10.029.405.239		2.070.999.325		2.478.427.673		2.702.423.704		2.689.171.350		2.941.022.052		20.269.370.050		128	
Sasaran 1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah		Nilai SAKIP	A	11,845,951,230	B	9,240,805,498	BB	9,135,072,439	0	2,005,397,625	B	2,343,876,973	B	2,459,983,304	B	2,264,610,350	B	9,073,868,252	B	18,314,673,750	B	154,61	KASAT
	01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	A	11,845,951,230	B	9,240,805,498	BB	9,135,072,439	0	2,005,397,625	B	2,343,876,973	B	2,459,983,304	B	2,264,610,350	B	9,073,868,252	B	18,314,673,750	B	154,61	
	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	A	285,886,221	B	32,432,500	BB	34,747,500	0	8,940,500	B	4,033,000	B	13,783,500	B	5,300,000	B	32,057,000	B	64,489,500	B	22,56	Sekretaris
	01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	103,029,285	14	5,785,000	14	8,543,500	6	5,640,500	4	1,633,000	1	-	3	-	14	7,273,500	28	13,058,500	175	12,675	Sub Bagian Program
	01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	66,843,319	1	4,347,000	1	2,814,000	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-	2	4,347,000	200	6,50	
	01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	45,262,668	1	2,582,500	1	3,053,000	0	-	0	-	1	3,026,500	0	-	1	3,026,500	2	5,609,000	50	12,39	
	01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	49,503,600	1	2,525,000	1	900,000	1	900,000	0	-	0	-	0	-	1	900,000	2	3,425,000	200	6,92	
	01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	58,136,676	2	4,033,000	2	1,550,000	0	-	1	-	0	-	0	4,100,000	1	4,100,000	3	8,133,000	75	13,99	
	01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28	54,557,911	22	3,103,000	22	10,687,000	7	1,200,000	5	-	5	9,557,000	5	-	22	10,757,000	44	13,860,000	157	25,40	
	01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	11,479,018	4	10,057,000	4	7,200,000	1	1,200,000	1	2,400,000	1	1,200,000	1	1,200,000	4	6,000,000	5	16,057,000	63	139,88	
	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	95,00	9,926,849,862	95	6,085,842,289	95%	6,327,248,207	21,96	1,444,588,707	48,22	1,727,554,453	74,73	1,556,006,812	93,87	1,336,669,154	74,73	6,064,789,126	170	12,150,631,415	179	122,40	Sekretaris
	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2,580	9,610,426,844	2,168	5,809,843,289	2,081	6,085,763,707	532	1,382,188,907	524	1,683,364,453	636	1,484,293,912	552	1,284,003,554	2,244	5,833,850,826	4,412	11,643,694,115	171	121,16	Sub Bagian Keuangan
	01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	156	271,446,856	242	240,828,000	242	206,088,000	40	45,918,000	68	44,190,000	98	55,700,000	100	50,170,000	306	195,978,000	548	436,806,000	351	160,92	
	01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	70	28,254,443	135	31,531,200	135	30,206,500	33	13,826,600	33	-	33	16,012,900	36	-	135	29,839,500	270	61,370,700	386	217,21	
	01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	5,782,163	1	3,639,800	1	3,099,200	1	2,049,200	0	-	0	-	0	1,050,000	1	3,099,200	2	6,739,000	200	116,55	
	01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran	4	10,939,556	-	4	2,090,800	1	576,000	1	-	1	-	1	1,445,600	4	2,021,600	4	2,021,600	100	18,48		

			Persentase Administrasi Kepegawaian	95		0		95		10.99		21.00		26.87		84.27		26.87		26.87		28.28			
	01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	61,691,490	0	-	10	40,180,000	0	-	0	-	4	32,837,300	4	44,180,000	8	77,017,300	8	77,017,300	133.33	124.84		Sekretaris
	01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Administrasi Kepegawaian	10	61,691,490	0	-	4	40,180,000	0	-	0	-	4	32,837,300	0	-	4	32,837,300	4	32,837,300	40	53.22825		
	01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	484,373,163	1	-	1	53,213,400						1	44,180,000	1	44,180,000							
	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.00	1,273,927,589	95	673,080,622	95	700,783,825	11.91	59,833,100	34.61	113,977,000	64.80	280,277,700	98.47	265,250,830	64.80	719,338,630	160	1,392,419,252	168	109.30	Sekretaris	
	01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	27,530,001	1	9,801,300	1	1,992,000	0.25	1,992,000	0.25	-	0.25	-	0.25	-	1.00	1,992,000	2	11,793,300	200	42.84		
	01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	261,808,013	1	78,484,900	1	68,306,175	0	-	0	-	1	68,000,000	0	6,646,125	1.00	74,646,125	2	153,131,025	200	58.49		
	01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	15,848,438	0	-	1	31,718,250	0	-	0	-	1	29,550,000	0	-	1.00	29,550,000	1.00	29,550,000	100	186.4537		
	01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	285,391,143	1	90,639,500	1	107,312,000	0.25	13,720,000	0.25	23,040,000	0.25	24,984,000	0.25	47,768,000	1	109,512,000	2	200,151,500	200	70.13		Sub Bagian Umum & Aparatur
	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	25,397,128	1	18,121,265	1	10,526,500	0.25	2,550,000	0.25	4,240,000	0.25	3,736,500	0.25	8,930,000	1	19,456,500	2	37,577,765	200	147.96		
	01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	6,344,943	36	4,680,000	36	7,200,000	9	-	9	1,950,000	9	1,560,000	9	1,170,000	36	4,680,000	72	9,360,000	150	147.52		
	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188	590,028,613	380	417,453,657	360	421,228,900	120	41,571,100	50	61,297,000	77	152,447,200	60	171,686,705	307	427,002,005	687	844,455,662	365	143.12		
	01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	17	77,427,748	17	53,900,000	15	52,500,000	0	-	15	23,450,000	0	-	0	29,050,000	15	52,500,000	32	106,400,000	188	137.42		
	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.00	103,029,285	95	2,074,991,730	95	1,836,097,777	26.84	454,048,120	54.37	465,818,010	75.15	460,047,560	99.55	454,787,060	75.15	1,834,700,750	170	3,909,692,480	179	3,794,739	Sekretaris	
	01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	869	6,016,756	475	64,713,290	500	6,000,000	125	1,500,000	125	996,000	125	1,992,000	125	1,512,000	500	6,000,000	975	70,713,290	112	1,175		
	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	148	70,742,464	114	5,400,000	84	67,080,701	21	14,671,660	21	14,954,290	21	17,967,810	84	19,788,710	147	67,382,470	261	72,782,470	176	102.88		Sub Bagian Umum & Aparatur
	01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	37	20,967,483	44	17,250,000	25	20,540,000	6	4,140,000	6	4,990,000	7	11,410,000	7	7,100,000	26	27,640,000	70	44,890,000	189	214.09		
	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	146	2,264,517,437	479	1,987,628,440	696	1,742,477,076	168	433,736,460	197	444,877,720	166	428,677,750	163	426,386,350	694	1,733,678,280	1,173	3,721,306,720	804	164.33		
	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK	87.00	359,184,528	89	374,458,357	89	196,015,130	89	38,017,198	89.32	32,494,510	89.32	117,030,432	89.32	158,423,306	89.32	345,965,446	178	720,423,803	205	200.57	Sekretaris	
	01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16,468	334,072,169	9,772	357,958,357	12,371	179,515,130	2,407	38,017,198	1,636	32,494,510	1,136	100,530,432	3,850	158,423,306	9,029	329,465,446	18,801	687,423,803	114	205.77		Sub Bagian Umum & Aparatur
	01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	25,112,359	1	16,500,000	1	16,500,000	0	-	0	-	1	16,500,000	0	-	1	16,500,000	2	33,000,000	200	131.41		

Sasaran 2	Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparat, masyarakat dan badan hukum		Persentase penegakan Perda/Perkada	100	3,967,217,501	100	1,087,542,500	100	894,332,800	40%	65,601,700	30%	134,550,700	20%	242,440,400	10%	424,561,000	70%	867,153,800	101	1,954,696,300	101	49.27	KASAT
	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum		Persentase Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda/ Perkada yang ditindaklanjuti	100		100		100		25%		25%		25%		25%		50%		101		101		
			Rasio Petugas Linmas	1.00		2.00		2.00		0		1.41		0		1.41		3		341				
			Jumlah SDM Satuan Polisi	246		450		300		0		90		186		0		276		726		295		
	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan Perda/Perkada	100	3,967,217,501	100	1,087,542,500	100	894,332,800	40%	65,601,700	30%	134,550,700	20%	242,440,400	10%	424,561,000	100%	867,153,800	101	1,954,696,300	101	49.27	
		Rasio Petugas Linmas	1.00	2.00		2.00		0		1.41		0		1.41		2.82		5		482				
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	246	450		300		0		90		186		0		276		726		295				
	02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda/ Perkada yang ditindaklanjuti	100	3,723,157,201	100	998,740,800	100	816,564,800	25%	65,601,700	25%	127,248,700	25%	231,370,400	25%	386,498,200	100%	810,719,000	101	1,809,459,800	101	48.60	Kabid PO
			Rasio Petugas Linmas	1.00		2		2		0		1.41		0		1.41		5		482		Kabid LI		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	246		450		300		0		90		186		0		276		726		295		Kabid PKP
	02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	75	1,199,166,139	27	614,884,900	30	529,511,500	5	53,540,000	3	103,476,700	12	140,103,400	10	254,265,300	30	551,385,400	57	1,166,270,300	76	97.26	Seksi Pengendalian Operasi
	02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	26	126,585,690	9	71,335,700	12	39,618,200	3	-	4	2,700,000	7	11,420,200	1	29,795,000	15	43,915,200	24	115,250,900	92	91.05	
	02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4	77,323,900	1	5,958,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,958,600	-	7.71		
	02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	70	1,046,544,743	46	200,666,800	18	125,520,400	2	5,925,000	5	17,739,500	12	32,528,100	19	57,418,000	38	113,610,600	84	314,277,400	120	30.03	
	02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	246	1,486,899,110	250	104,394,800	300	118,089,700	0	6,136,700	90	3,332,500	96	47,318,700	272	43,219,900	458	100,007,800	708	204,402,600	288	13.75	Kabid. PKP
	02.2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Pengakan Perda dan Perkada yang Terlayani	10	12,000,000	3	1,500,000	3	3,825,000	0	-	0	-	0	-	3	1,800,000	3	1,800,000	6	3,300,000	60	27.50	Seksi Pengendalian Operas

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Hasil analisis untuk menetapkan kinerja Tahun 2024 menggunakan data realisasi n-1 dan n-2 serta berdasarkan hasil Evaluasi baik secara internal maupun Hasil Evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu. Dari hasil analisis capaian kinerja pada dua tahun sebelumnya serta dari hasil evaluasi internal/ evaluator maka dilakukan perbaikan/ penyempurnaan sehingga diperoleh proyeksi untuk tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Kode	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK Permendagri 18 2020	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
				(tahun n-2)	(tahun n-1)	(tahun n)	(tahun n+1)	(tahun n- 2)	(tahun n- 1)	(tahun n)	(tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
xx	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum			100	100	100	100	100	100	100	100	RPJMD
01	Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP			25,01	25,26	25,51	25,76	25,48	25,48	25,26	25,76	
	Nilai SAKIP			BB	BB	BB	BB	B	B	B	BB	
01.2.01.01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			16	16	16	16	16	14	14	16	
01.2.01.02	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1	1	1	1	1	1	1	1	
01.2.01.03	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			4	4	4	4	4	4	1	4	

01.2.01.04	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1	1	1	1	1	1	1	1	
01.2.01.05	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			4	4	4	4	4	2	1	4	
01.2.01.06	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			28	28	28	28	25	22	22	28	
01.2.01.07	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8	8	8	8	7	4	4	8	Evaluasi SAKIP & RB
01.2.02	Persentase Administrasi Keuangan			95,00	95,00	95,00	95,00	98,92	95,00	74,73	95,00	
01.2.02.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			2.540	2.550	2.560	2.570	2.354	2.168	2.244	2.570	
01.2.02.03	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD			156	156	156	156	376	242	306	156	
01.2.02.04	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			70	70	70	70	135	135	135	70	
01.2.02.05	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1	1	1	1	1	1	1	1	

01.2.06.06	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			48	48	48	48	48	36	36	48	
01.2.06.07	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan			1	1	1	1	-	0	0	1	
01.2.06.09	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			180	182	184	186	406	380	307	186	
01.2.06.11	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			13	14	15	16	13	17	15	16	
01.2.08	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			95,00	95,00	95,00	95,00	99,52	95,00	75,15	95,00	
01.2.08.01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			715	751	788	828	-	475	500	828	
01.2.08.02	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			144	145	146	147	159	114	147	147	
01.2.08.03	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			29	31	33	35	29	44	26	35	
01.2.08.04	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			126	131	136	141	660	479	694	141	
01.2.09	Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK			90,00	89,00	88,00	87,00	89,32	89,00	89,32	87,00	
01.2.09.02	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			14.632	15.071	15.523	15.989	11.726	9.772	9.029	15.989	

01.2.09.08	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			1	1	1	1	1	1	1	1	
02	Persentase penegakan Perda/Perkada			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Rasio Petugas LINMAS			0,96	0,97	0,98	0,99	0,87	2,00	2,82	0,98	
	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			213	218	225	234	154	450	276	234	
02.2.01	Persentase Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda/ Perkada yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	100	100	100	100	
02.2.01.01	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			50	55	60	65	22	27	30	65	
02.2.01.02	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			12	14	17	21	8	9	15	21	

02.2.01.03	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			4	4	4	4	0	1	0	41	
02.2.01.04	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			64	66	67	68	32	46	38	68	
02.2.01.05	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			213	218	225	234	154	250	458	234	
02.2.01.10	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani			10	10	10	10	0	3	3	10	SPM Ganti Rugi (Realisasi Rendah adalah Kinerja Terbaik)
02.2.02	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada			100	100	100	100	100	100	100	100	
02.2.02.01	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/			3	5	8		0	0	2	0	
02.2.02.02	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			360	360	360	360	523	577	598	360	Kegiatan Patroli

02.2.02.03	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP			5	6	7	8	8	7	9	8	
02.2.03	Persentase PPNS yang Aktif			33,33	40,00	45,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
02.2.03.01	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada			1	1	1	1	-	-	0	1	



2.3. ISI-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakkan perundangan-undangan daerah.
- c. Pelaksanaan kordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perundang-undangan daerah serta perlindungan masyarakat dengan aparat kepolisian negara dan atau lembaga lainnya.
- d. Pengelolaan barang/kekayaan milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- e. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- f. Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati Kapuas Hulu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan Visi Bupati Kapuas Hulu yaitu **"TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL"**

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya dan Keamanan;
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas, dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas;

5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

1. Koordinasi antar instansi lemah;
2. Ketaatan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada sangat kurang;
3. Tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
4. Peralatan dan Perlengkapan Operasional Penegakan Perda/ Perkada belum memadai;
5. Jumlah Anggota Operasional yang belum memadai;
6. Kurangnya sosialisasi tentang Perda/ Perkada ke masyarakat;
7. Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Kapuas Hulu yang sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan masyarakat;
8. Tingkat minat masyarakat untuk menjadi anggota Linmas sangat kurang;
9. Kurangnya Peran Serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan;
10. Tidak adanya Peralatan dan Perlengkapan anggota LINMAS;
11. Penerapan SPM Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Perda/ Perkada;
12. Anggota banyak yang tidak hadir dalam kegiatan seperti Dalmas dan Kesamaptaan;
13. Anggota LINMAS Desa tidak pernah menyampaikan Laporan Kegiatan;
14. Belum maksimalnya Pengawasan dan Penegakan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah;
15. Keterbatasan Anggaran dan Sarana Prasarana yang belum memadai;
16. Jumlah anggota Satpol PP yang belum memadai;
17. Penataan Pasar yang belum maksimal sehingga meningkatnya pedagang kaki lima yang berjualan di sembarang tempat;
18. Penggunaan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
19. Kegiatan masyarakat yang berpotensi/telah merusak lingkungan;
20. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam menjaga kebersihan;
21. Penyakit masyarakat seperti perjudian, minuman keras, prostitusi dan penggunaan narkoba;
22. Kenakalan remaja dan pelajar;
23. Jumlah Pos Kamling yang tidak ideal.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang

dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut :



Tabel 2. 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat.	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
xx	Meningkatnya kondusifitas wilayah		Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	RPJMD	Meningkatnya kondusivitas wilayah		Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	RPJMD		
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					9.974.798.876	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					9.766.085.000	
1.05.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP	25,51	8.985.230.276	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP	25,51	8.961.525.400		
			Nilai SAKIP	BB				Nilai SAKIP	BB			
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP	BB	34.747.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP	BB	37.944.700		
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	8.543.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	8.541.800		
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	2.814.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	2.887.000		
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	3.053.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	3.299.000		
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	900.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	3.000.000		
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	1.550.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2.980.000		

1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28	10.687.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26	10.036.900	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	7.200.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	7.200.000	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan	95	6.580.955.837	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Administrasi Keuangan	95	7.819.187.100	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.560	6.320.471.337	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.270	7.599.086.000	
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	156	223.088.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	190	184.320.000	
1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	70	30.206.500	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	135	30.437.500	
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	3.099.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	3.229.600	
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4	2.090.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4	2.114.000	

1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1		
1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen BahanTanggapanmPemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	0	
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Administrasi Barang Milik Daearah	95	2.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Administrasi Barang Milik Daearah	95	0	
1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	0	
1.05.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	1.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	0	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian	95	4.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian	95	121403.400	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5		
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	0	
1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	1.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	0	
1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	676	1.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	580	0	
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	1.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	121.403.400	

1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	95	460.424.767	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	95	623.640.000	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	10.490.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	8.540.000	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	1.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	49.270.000	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	0	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	84.120.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	137.880.000	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	9.550.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	17.457.000	
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	7.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	7.200.000	
1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	0	Penyediaan Bahan/Material	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	0	
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	0	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184	293.564.767	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184	349.273.000	
1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15	52.500.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	19	54.000.000	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95	3.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95	1.030.000.000	

1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11	1.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	0	
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1.000.000	Pengadaan Mebel	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	37.379.250	
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	1.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	0	
1.05.01.2.07.0009						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	
1.05.01.2.07.0010						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	
1.05.01.2.07.0011						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95	1.691.741.542	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95	123.428.200	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	715	6.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	788	6.000.000	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	67.080.700	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	65.160.000	
1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	33	17.250.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	33	19.520.000	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	136	1.601.410.842	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	770	32.748.200	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK	88,00	198.360.630	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan Sarana, Prasarana, dan Aset dalam Kondisi BAIK	88,00	319.966.150	

1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15.523	191.860.630	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15.523	303.466.150	
1.05.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	6.500.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	16.500.000	
1.05.01.2.09.0009						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penegakan Perda/Perkada	100	1.247.315.090	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penegakan Perda/Perkada	100	1.069.969.840	
			Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100				Persentase peningkatan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100		
			Rasio Petugas LINMAS	0,98				Rasio Petugas LINMAS	2,00		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	225				Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	300		
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda/ Perkada yang ditindaklanjuti	100	1.120.193.010	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda/ Perkada yang ditindaklanjuti	100	595.285.900	
			Rasio Petugas LINMAS	0,98				Rasio Petugas LINMAS	2,00		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	225				Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	300		

1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	33	148.311.500	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	33	76.201.900	
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	213	162.264.100	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	300	64.154.500	
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum				1.000.000	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1	0	
1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1.000.000	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1	0	
1.05.02.2.01.0010						Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	10	0	
1.05.02.2.01.0011						Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	2	0	

1.05.02.2.01.0012						Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	5	0	
1.05.02.2.01.0013						Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20	0	
1.05.02.2.01.0014						Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	50	0	
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	24	530.411.500	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	24	392.329.500	
1.05.02.2.01.0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12	40.839.100	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12	60.050.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentrman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	0	1.000.000						

1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	10	3.825.000	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	8	2.550.000	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	100	97.917.400	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	100	87.870.300	
1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1.000.000	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3	0	
1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1.000.000	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3	0	
1.05.02.2.02.0006						Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	2	0	
1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1.000.000	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5	0	
1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah				1.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	4	0	
1.05.02.2.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah				1.000.000	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	4	0	

1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	3	12.580.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3	21.140.000	
1.05.02.2.02.0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	5	49.215.400	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	7	34.679.300	
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	360	31.122.000	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	560	32.051.000	
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Persentase PPNS yang Aktif	33,33	3.000.000	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Persentase PPNS yang Aktif	100	0	
1.05.02.2.03.0002	Pembentukan Sekretariat PPNS				1.000.000	Pembentukan Sekretariat PPNS	Satuan Polisi Pamong Praja	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1	0	
1.05.02.2.03.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah				1.000.000	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1	0	
1.05.02.2.03.0004	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	0	0	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	2	0	

1.05.02.2.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS				1.000.000	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1	0	
TOTAL					9.974.798.876				9.766.085.000		

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada bagian ini dapat kami uraikan mengenai usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-Asosiasi, perguruan tinggi maupun seluruh SKPD Kabupaten Kapuas Hulu yang mana terdapat beberapa usulah terkait peningkatan gangguan keamanan dan trantibum serta perlindungan masyarakat.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NIHIL	NIHIL	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang didasarkan pada asas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta asas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Ini berarti daerah diberikan keleluasan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Salah satu pertimbangan yang mendasar perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia dan sumber daya alam, dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Daerah kabupaten/kota adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan, karena daerah-daerah tersebut yang lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Pada akhirnya dapat meningkatkan *Local accountability* pemerintah terhadap rakyatnya.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan tetap atau selalu eksis tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah, selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini mengingat peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagaimana tercantum dalam Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 (pasal 148) : “ Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja”.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi Bupati Tahun 2021-2026. Penetapan tujuan akan mengarah kepada

perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan pernyataan diatas maka tujuan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 sesuai dengan [Renstra 2021-2026](#) adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. Meningkatkan kondusifitas wilayah.

Adapun sasaran dari Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 adalah :

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
- b. Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum;
- c. Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Ranhir Renja Satpol PP Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TAHUN 2025
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP	25,76
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Satpol PP	25,76
			Nilai SAKIP	BB
2	Meningkatnya kondusifitas wilayah		Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%
		Meningkatkan Peraturan Daerah yang dapat ditegakkan pada aparatur, masyarakat dan badan hukum	Persentase penegakan Perda/Perkada	100%
		Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penanganan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda/Perkada	100%
			Rasio Petugas LINMAS	0,99
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	234

3.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan 2 program dan 7 Kegiatan dengan 32 Sub Kegiatan.

Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

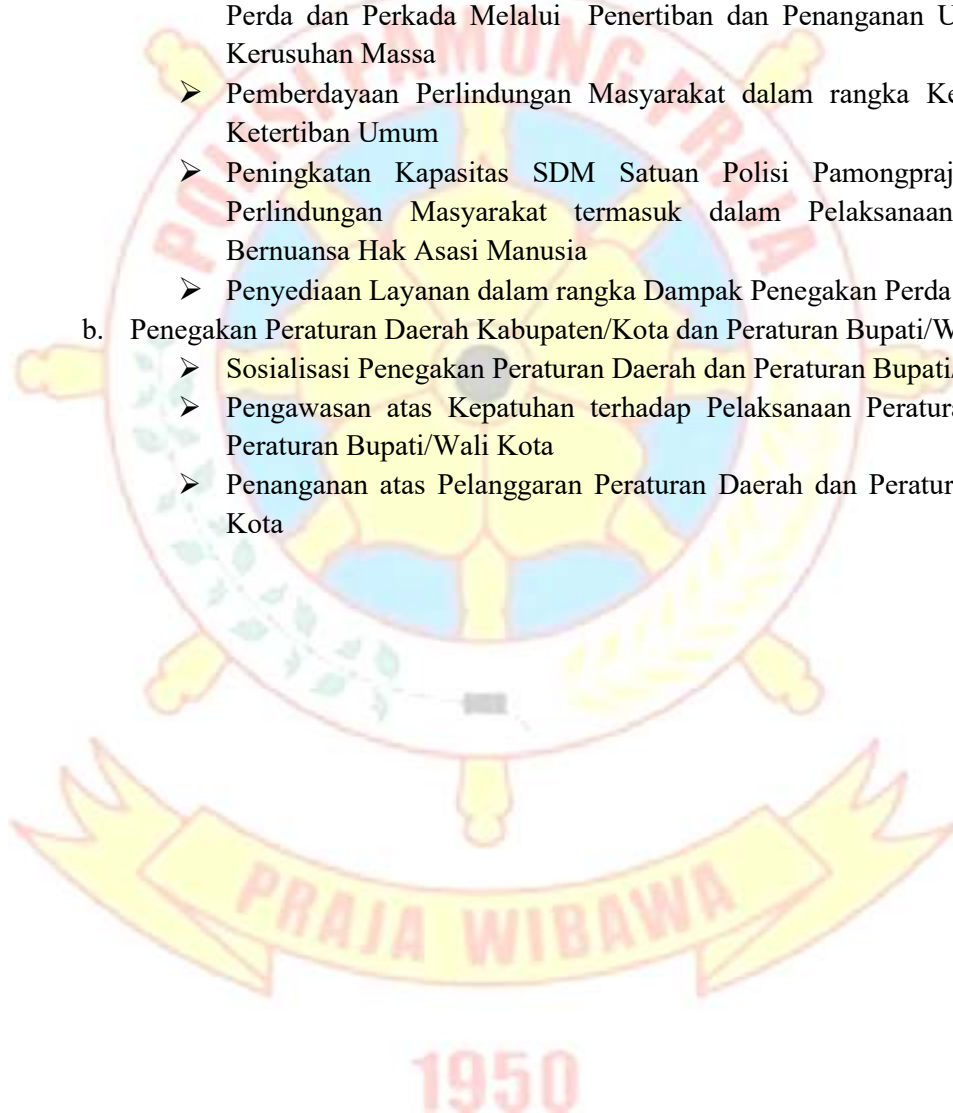
Capaian kinerja sasaran diarahkan pada upaya meningkatkan nilai SAKIP Satpol PP secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 1 program dan 7 Kegiatan dengan 37 Sub Kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

Sasaran 2 : Meningkatnya kondusivitas wilayah

Capaian kinerja sasaran diarahkan pada upaya meningkatkan kondusivitas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 1 program dan 2 kegiatan dengan 7 Sub Kegiatan yaitu

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
 - Penindakan atas Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentrman dan Ketertiban Umum
 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
 - Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada
 - b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota



PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. KAPUAS HULU TAHUN 2025																
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						9.766.085.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.766.085.000,00							0,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						9.766.085.000,00							0,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	9.082.928.800,00						-	0,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	37.944.700,00			-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana)	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Dokumen	8.541.800,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.887.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.299.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat transformasi pelayanan publik Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2.980.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				22 Laporan	10.036.900,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	7.200.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	7.819.187.100,00			-	Memperkuat transformasi pelayanan publik Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana)	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2.168 Orang/bulan	7.599.086.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Memperkuat transformasi pelayanan publik Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				242 Dokumen	184.320.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memperkuat transformasi pelayanan publik Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				135 Dokumen	30.437.500,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat transformasi pelayanan publik Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Peningkatan Daerah Yang Belum Terlayani	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.229.600,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Memperkuat transformasi pelayanan publik Mendorong Kajian Dan Legalitas Tanaman Kratom	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat transformasi pelayanan publik Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	2.114.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Penguatan Daerah Yang Belum Terlayani	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat transformasi pelayanan publik Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Peningantasan Daerah Yang Belum Terlayani	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdayasaing Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Peningantasan Daerah Yang Belum Terlayani	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Mendorong Pembangu nan Jaringan Te lekomunika si Dan Listrik Dalam Upaya Pen gentasan Daerah Yang Belum Terlayani	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkua t transform asi pelayanan publik Mendorong Kajian Dan Legalitas Tanaman Kratom	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	121.403.400,00			-	Memperkua t transform asi pelayanan publik Membangu n Tata Kelola Niaga Dan Pemberday aan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana)	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memperkuat transformasi pelayanan publik Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				676 Dokumen	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat Mendorong Kajian Dan Legalitas Tanaman Kratom	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	121.403.400,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memperkuat transformasi pelayanan publik Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	623.620.000,00			-	Memperkuat transformasi pelayanan publik Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana)	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.540.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Memperkuat transformasi pelayanan publik Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	49.270.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Memperkuat transformasi pelayanan publik Mendorong Kajian Dan Legalitas Tanaman Kratom	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat transformasi pelayanan publik Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	137.880.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Memperkuat transformasi pelayanan publik Mendorong Kajian Dan Legalitas Tanaman Kratom	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	17.457.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Memperkuat transformasi pelayanan publik Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				36 Dokumen	7.200.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat transformasi pelayanan publik Mendorong Pola Pendidikan Berasrama Yang Bersumber Dari Dana CSR	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				360 Laporan	349.273.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memperkuat transformasi pelayanan publik Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				17 Dokumen	54.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	37.379.250,00			-	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup Mendorong Kajian Dan Legalitas Tanaman Kratom	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup Mendorong Kajian Dan Legalitas Tanaman Kratom	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	37.379.250,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat transformasi pelayanan publik Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat transformasi pelayanan publik Mendorong Pola Pendidikan Berasrama Yang Bersumber Dari Dana CSR	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	123.428.200,00			-	Meningkatk an ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup Mendorong Kajian Dan Legalitas Tanaman Kratom	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				450 Laporan	6.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatk an ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup Mendorong Kajian Dan Legalitas Tanaman Kratom	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				84 Laporan	65.160.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatk an ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup Mendorong Pembangu nan Jaringan Te lekomunika si Dan Listrik Dalam Upaya Pen gentasan Daerah Yang Belum Terlayani	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Laporan	19.520.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatk an ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup Mendorong Pembangu nan Jaringan Te lekomunika si Dan Listrik Dalam Upaya Pen gentasan Daerah Yang Belum Terlayani	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				797 Laporan	32.748.200,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memperkua t transform asi pelayanan publik Mendorong Pola Pendidikan Berasrama Yang Bersumber Dari Dana CSR	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	319.966.150,00			-	Meningkatk an ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup Membangu n Tata Kelola Niaga Dan Pemberday aan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana)	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	303.466.150,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup Membangun Tata Kelola Niaga Dan Pemberdayaan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	16.500.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	683.156.200,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	595.285.900,00			-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Peningtasan Daerah Yang Belum Terlayani	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi berbasis SDA, Hilirisasi Industri dan Pemberdayaan Masyarakat Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Peningtasan Daerah Yang Belum Terlayani	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				35 Dokumen	76.201.900,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia														
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				100 Orang	64.154.500,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Memperkuat transformasi pelayanan publik Mendorong Kajian Dan Legalitas Tanaman Kratom	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				2 Dokumen	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				2 Dokumen	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup Mendorong Pembangu nan Jaringan Te lekomunika si Dan Listrik Dalam Upaya Pen gentasan Daerah Yang Belum Terlayani	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional														
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja				18 Orang	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup Mendorong Pembangu nan Jaringan Te lekomunika si Dan Listrik Dalam Upaya Pen gentasan Daerah Yang Belum Terlayani	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah				2 Dokumen	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan														
			Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.				10 Orang	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat transformasi pelayanan publik Mendorong Pola Pendidikan Berasrama Yang Bersumber Dari Dana CSR	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat														
			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				30 Orang	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat transformasi pelayanan publik Mendorong Pola Pendidikan Berasrama Yang Bersumber Dari Dana CSR	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				10 Orang	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				40 laporan	392.329.500,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				12 Laporan	60.050.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkuat transformasi pelayanan publik Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah														
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				6 Laporan	2.550.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-			-	87.870.300,00			-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Mendorong Pola Pendidikan Berasrama Yang Bersumber Dari Dana CSR	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				2 laporan	87.870.300,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Mendorong Pola Pendidikan Berasrama Yang Bersumber Dari Dana CSR	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				2 dokumen	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Meningkatk an Kapasitas Tenaga Kesehatan Yang Berori entasi Pada Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Bidang Kesehatan	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah				5 unit	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memperkua t transform asi pelayanan publik Mendorong Pola Pendidikan Berasrama Yang Bersumber Dari Dana CSR	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				5 Laporan	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup Membangu n Tata Kelola Niaga Dan Pemberday aan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah														
			Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan				5 laporan	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Mendorong Pola Pendidikan Berasrama Yang Bersumber Dari Dana CSR	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda				5 Dokumen	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Meningkatk an Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangu nan Ruang Terbuka Hijau	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				3 Laporan	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup Mendorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Dan Listrik Dalam Upaya Pengentasan Daerah Yang Belum Terlayani	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				5 Laporan	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Mendorong Pola Pendidikan Berasrama Yang Bersumber Dari Dana CSR	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				560 Laporan	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Membangu n Tata Kelola Niaga Dan Pemberday aan Petani Terkait Dengan Komoditi Potensial (Karet, Madu, Walet, Ikan Arwana)	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Meningkatkan an Kapasitas Tenaga Kesehatan Yang Berori entasi Pada Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Bidang Kesehatan	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0002	Pembentukan Sekretariat PPNS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS				2 Dokumen	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Meningkatkan an Kapasitas Tenaga Kesehatan Yang Berori entasi Pada Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Bidang Kesehatan	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah				2 Dokumen	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup Mendorong Pembangu nan Jaringan Te lekomunika si Dan Listrik Dalam Upaya Pen gentasan Daerah Yang Belum Terlayani	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah				1 Laporan	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas dan Kuantitas In frastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Mendorong Pembangu nan Jaringan Te lekomunika si Dan Listrik Dalam Upaya Pen gentasan Daerah Yang Belum Terlayani	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS															
			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS				3 Laporan	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an ketahanan terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup Mendorong Pembangu nan Jaringan Te lekomunika si Dan Listrik Dalam Upaya Pen gentasan Daerah Yang Belum Terlayani	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	J U M L A H							9.766.085.000,00							0,00		

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan keamanan, Ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru mengenai keamanan, ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan 1 (satu) Tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,



BAITTIAR, S.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671010 199703 1 007